

ANALISIS KEGAGALAN *INTERACTIVE GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA RUANG TERBUKA PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DI KAWASAN PUNCAK BOGOR

Radhon F. Albasith¹, Neny Marlina²

Email: radhon.razaqu@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesenjangan antara regulasi dan implementasi, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peta aktor dan relasinya serta mengidentifikasi kegagalan penerapan prinsip *interactive governance* pada Taman Simpang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka dengan analisis data Miles dan Huberman. Kerangka analisis mengacu pada teori *Interactive Governance* Jan Kooiman (2003) yang meliputi dimensi komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga lokasi memiliki karakteristik aktor yang berbeda, seluruhnya menghadapi persoalan tata kelola yang serupa, yaitu komunikasi yang cenderung hierarkis, koordinasi lintas dinas yang lemah, negosiasi yang bersifat reaktif, serta kolaborasi dan partisipasi yang belum optimal. Kegagalan paling nyata terlihat pada Taman Simpang 4 Ciawi akibat tidak dilibatkannya pemilik lahan sejak tahap perencanaan, sedangkan pengelolaan Taman Kecamatan Megamendung dan Rest Area Gunung Mas masih menghadapi kelemahan dalam aspek kelembagaan dan koordinasi. Penelitian menyimpulkan bahwa tidak berjalannya prinsip *interactive governance* menyebabkan ruang terbuka publik belum mampu berfungsi secara optimal, sehingga diperlukan tata kelola yang lebih inklusif melalui penguatan koordinasi lintas aktor, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, dan penetapan standar pengelolaan pascapembangunan.

Kata Kunci: *Interactive Governance*, Ruang Terbuka Publik, Kawasan Puncak Bogor, Tata Kelola Pemerintahan, Peta Aktor

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Public open space governance in the Puncak Area of Bogor continues to face various challenges, including the gap between regulatory frameworks and their implementation, weak coordination among government agencies, and limited public participation. This study aims to analyze the actor map and their relationships, as well as to identify the failure of implementing the principles of *Interactive Governance* in Simpang 4 Ciawi Park, Megamendung District Office Park, and Gunung Mas Rest Area. This research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observations, and literature review, with data analyzed through the Miles and Huberman interactive model. The analytical framework was based on Jan Kooiman's (2003) *Interactive Governance* theory, encompassing the dimensions of communication, coordination, negotiation, collaboration, and participation.

The findings reveal that although the three public open spaces involve different actor configurations, they share similar governance problems, including hierarchical communication, weak inter-agency coordination, reactive negotiation, and suboptimal collaboration and public participation. The most significant governance failure occurred at Simpang 4 Ciawi Park, where the landowner was excluded from the planning process, resulting in the closure of the park. Meanwhile, the management of Megamendung District Office Park and Gunung Mas Rest Area continues to experience institutional and coordination challenges. The study concludes that the failure to implement the principles of *Interactive Governance* has prevented public open spaces from functioning optimally. Therefore, a more inclusive governance approach is required through stronger cross-sectoral coordination, meaningful public participation from the planning stage, and the establishment of post-development management standards.

Keywords: *Interactive Governance, Public Open Space, Puncak Area of Bogor, Governance, Actor Mapping*

PENDAHULUAN

Ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan perkotaan karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, estetika, ekonomi, dan rekreasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan ruang terbuka publik menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan karena mampu menyediakan ruang yang inklusif, mudah diakses, serta mendukung keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan ruang terbuka publik tidak lagi dipandang sebatas penyediaan infrastruktur, melainkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga pemeliharaan ruang publik.

Di Indonesia, pengelolaan ruang terbuka publik telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan proporsi 20% berupa ruang terbuka hijau publik yang dikelola

pemerintah daerah. Amanat tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjamin ketersediaan ruang publik yang dapat diakses masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bogor, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044 yang menegaskan pentingnya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik sebagai bagian dari penataan ruang daerah.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi pengelolaan ruang terbuka publik di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, lemahnya partisipasi masyarakat, hingga belum optimalnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan pengelolaan ruang terbuka publik belum mampu memenuhi fungsi sosial maupun ekologis secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ruang terbuka publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses tata kelola.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Kawasan Puncak Bogor yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional

sekaligus destinasi wisata utama di Jawa Barat. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air sekaligus kawasan lindung yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, tingginya aktivitas pariwisata, pembangunan kawasan komersial, pertumbuhan permukiman, serta meningkatnya tekanan terhadap penggunaan lahan menjadikan pengelolaan ruang terbuka publik semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang berkualitas.

Dalam praktiknya, pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih menunjukkan berbagai persoalan. Target penyediaan ruang terbuka hijau publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi belum sepenuhnya tercapai. Masih ditemukan alih fungsi lahan, pembangunan bangunan ilegal, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Puncak, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan ruang terbuka publik yang terintegrasi. Akibatnya, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah belum berjalan optimal sehingga proses

perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan ruang terbuka publik sering kali berlangsung secara sektoral.

Fenomena tersebut tercermin pada tiga ruang terbuka publik yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Taman Simpang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas. Ketiga lokasi tersebut memperlihatkan karakteristik tata kelola yang berbeda. Taman Simpang 4 Ciawi mengalami kegagalan pemanfaatan akibat konflik legalitas lahan yang menyebabkan taman tidak dapat digunakan masyarakat. Taman Kantor Kecamatan Megamendung menunjukkan pengelolaan yang relatif lebih baik, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Rest Area Gunung Mas memperlihatkan pola kolaborasi yang lebih kompleks dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, sektor swasta, serta pelaku usaha mikro, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Variasi kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan ruang terbuka publik sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antaraktor yang terlibat.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas efektivitas ruang terbuka publik,

implementasi kebijakan, manajemen ruang publik, maupun optimalisasi ruang terbuka hijau melalui perspektif administrasi publik dan manajemen. Penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek penyediaan fasilitas, pemeliharaan, implementasi kebijakan, atau efektivitas pemanfaatan ruang publik. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kegagalan tata kelola ruang terbuka publik melalui perspektif *Interactive Governance*, khususnya pada kawasan wisata dengan karakteristik ekologis yang kompleks seperti Kawasan Puncak Bogor. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu lokasi penelitian, sehingga belum mampu menjelaskan variasi pola interaksi antaraktor pada beberapa tipologi ruang terbuka publik dalam satu kawasan.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *Interactive Governance* yang dikembangkan oleh Jan Kooiman. Perspektif ini memandang tata kelola sebagai proses interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik melalui komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan tata kelola

tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kualitas hubungan antaraktor dalam keseluruhan proses pengelolaan. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada identifikasi permasalahan administratif, melainkan menelusuri bagaimana dinamika interaksi antaraktor memengaruhi keberhasilan pengelolaan ruang terbuka publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta aktor beserta relasinya dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor serta menganalisis kegagalan *Interactive Governance* pada pengelolaan Taman Simping 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memahami kegagalan interaksi antaraktor dalam pengelolaan ruang terbuka publik, sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat pola kolaborasi dan tata kelola ruang publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif untuk menganalisis kegagalan *Interactive Governance* dalam tata kelola ruang terbuka publik oleh Pemerintah Kabupaten Bogor di Kawasan Puncak Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hubungan antaraktor, proses pengambilan keputusan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan tata kelola ruang terbuka publik. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis ataupun mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menjelaskan fenomena tata kelola berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Lokasi penelitian berada di Kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, yang difokuskan pada tiga ruang terbuka publik, yaitu Taman Sim pang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas di Kecamatan Cisarua. Ketiga lokasi dipilih secara purposive karena merepresentasikan karakteristik tata kelola yang berbeda. Taman Sim pang 4 Ciawi dipilih karena mengalami kegagalan pemanfaatan akibat konflik kepemilikan lahan sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. Taman Kantor Kecamatan Megamendung dipilih karena menunjukkan pola pengelolaan

yang relatif lebih baik dengan keterlibatan pemerintah kecamatan dalam pemeliharaan taman. Sementara itu, Rest Area Gunung Mas dipilih karena memiliki struktur tata kelola yang lebih kompleks dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, sektor swasta, serta pelaku usaha mikro dalam proses pengelolaannya. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan peneliti melakukan analisis komparatif mengenai pola interaksi antaraktor pada masing-masing lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, maupun keterlibatan langsung dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Informan penelitian meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, PT Sayaga Wisata sebagai pengelola Rest Area Gunung Mas, komunitas masyarakat, serta pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh mampu menjelaskan proses tata kelola secara komprehensif.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka publik, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044, Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2023, laporan perencanaan pembangunan daerah, dokumen teknis dari perangkat daerah, serta berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep *Interactive Governance* maupun tata kelola ruang terbuka publik. Penggunaan data sekunder bertujuan memperkuat hasil analisis yang diperoleh melalui data primer sekaligus memberikan pemahaman mengenai konteks kebijakan yang melandasi pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Bogor.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada ketiga lokasi penelitian untuk mengamati kondisi

fisik ruang terbuka publik, aktivitas masyarakat, fasilitas pendukung, serta bentuk interaksi antaraktor dalam proses pengelolaan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima dimensi *Interactive Governance* menurut Jan Kooiman, yaitu komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan, laporan kegiatan, foto lapangan, notulen rapat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka publik guna melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara maupun observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi, matriks, dan pemetaan hubungan antaraktor sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola interaksi yang terbentuk pada setiap lokasi penelitian. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan

dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan teori *Interactive Governance* Jan Kooiman (2003) sehingga diperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh dapat diuji konsistensi dan kredibilitasnya sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi. Analisis penelitian kemudian diarahkan pada lima dimensi *Interactive Governance*, yaitu komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi, untuk menjelaskan bagaimana interaksi antaraktor berlangsung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tata kelola ruang terbuka publik di Taman Simpang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Aktor dan Relasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Puncak Bogor

Pengelolaan ruang terbuka publik merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda. Dalam perspektif *Interactive Governance*, keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang terbangun antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi peta aktor menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana hubungan antaraktor memengaruhi proses pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor melibatkan tiga kelompok aktor utama, yaitu aktor pemerintah (*state*), aktor swasta (*market*), dan aktor masyarakat (*civil society*). Aktor pemerintah terdiri atas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Cisarua. DPKPP berperan sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki

kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan ruang terbuka publik. Sementara itu, Bapperida berfungsi melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan dokumen tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Pada tingkat kewilayahan, pemerintah kecamatan berperan sebagai penyedia informasi kondisi lapangan sekaligus penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Kelompok aktor swasta terdiri atas kontraktor pelaksana pembangunan, PT Jasamarga, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan PT Sayaga Wisata. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Kontraktor berperan dalam pembangunan fisik ruang terbuka publik berdasarkan kontrak kerja dengan pemerintah daerah. PT Jasamarga memiliki kewenangan atas lahan di lokasi Taman Simpang 4 Ciawi, sedangkan PTPN menjadi pemilik lahan kawasan Gunung Mas. Di sisi lain, PT Sayaga Wisata sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperoleh mandat untuk mengelola operasional Rest Area Gunung Mas setelah pembangunan selesai. Keberadaan aktor swasta menunjukkan bahwa tata kelola ruang terbuka publik tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata,

melainkan membutuhkan dukungan aktor lain yang memiliki sumber daya berupa aset, modal, maupun kapasitas manajerial.

Kelompok masyarakat terdiri atas Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka publik. Secara normatif, masyarakat memiliki posisi sebagai penerima manfaat sekaligus aktor yang berhak berpartisipasi dalam proses tata kelola. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pemanfaatan ruang terbuka publik. Pada sebagian besar kasus, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan sehingga perannya lebih bersifat pasif dibandingkan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola.

Analisis terhadap ketiga lokasi penelitian menunjukkan adanya variasi konfigurasi aktor. Pada Taman Simpang 4 Ciawi terdapat tujuh aktor utama, yaitu DPKPP Kabupaten Bogor, Bapperida Kabupaten Bogor, PT Sumber Cipta Gemilang sebagai kontraktor, PT Jasamarga selaku pemilik lahan, Kecamatan Ciawi, AMBS, dan masyarakat umum. Meskipun jumlah aktor relatif sedikit, hubungan yang terbangun tidak mencerminkan tata kelola yang kolaboratif. DPKPP Kabupaten Bogor

menjadi aktor dominan yang mengendalikan hampir seluruh proses pembangunan, mulai dari penentuan lokasi, desain, anggaran, hingga pemilihan kontraktor. Sebaliknya, PT Jasamarga sebagai pemilik sah lahan justru tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Ketidakhadiran aktor yang memiliki otoritas atas lahan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya konflik kepemilikan yang berujung pada penutupan taman setelah pembangunan selesai. Dengan demikian, kegagalan Taman Simpang 4 Ciawi bukan disebabkan oleh aspek teknis pembangunan, melainkan oleh kegagalan membangun relasi antarlembaga sejak awal proses tata kelola.

Berbeda dengan Taman Simpang 4 Ciawi, konfigurasi aktor pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung menunjukkan hubungan yang relatif lebih stabil. Aktor yang terlibat terdiri atas DPKPP Kabupaten Bogor, Bapperida Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, PT Karunia Jaya Abadipratama sebagai kontraktor, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dan masyarakat pengguna taman. Faktor yang membedakan lokasi ini adalah status lahan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Megamendung sehingga tidak menimbulkan konflik kepemilikan. Selain itu, setelah pembangunan selesai, Kecamatan

Megamendung mengambil alih pengelolaan taman melalui kegiatan pemeliharaan rutin, pengawasan kebersihan, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pengalihan pengelolaan tersebut tidak didukung oleh dokumen serah terima maupun standar operasional prosedur yang jelas. Akibatnya, keberlanjutan pengelolaan lebih bergantung pada komitmen pemerintah kecamatan daripada sistem kelembagaan yang formal.

Konfigurasi aktor yang paling kompleks ditemukan pada Rest Area Gunung Mas. Pengelolaan kawasan ini melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Perkebunan Nusantara sebagai pemilik lahan, PT Sayaga Wisata sebagai pengelola, pelaku UMKM, pemerintah kecamatan, serta berbagai instansi pendukung lainnya. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Rest Area Gunung Mas memiliki karakteristik *multi-actor governance*, yaitu melibatkan banyak organisasi dengan fungsi yang saling melengkapi. Di satu sisi, keberagaman aktor membuka peluang terciptanya kolaborasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, semakin banyak aktor yang terlibat juga meningkatkan kebutuhan akan mekanisme koordinasi, komunikasi, dan pembagian kewenangan yang lebih jelas

agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas maupun konflik kepentingan.

Jika ketiga lokasi dibandingkan, terlihat adanya perbedaan tingkat kompleksitas aktor, tetapi memiliki pola tata kelola yang relatif sama. DPKPP Kabupaten Bogor selalu menjadi aktor dominan dalam seluruh proses pembangunan ruang terbuka publik. Bapperida berperan sebagai penyelarasan kebijakan pembangunan, sedangkan pemerintah kecamatan lebih banyak menjalankan fungsi administratif dan operasional setelah pembangunan selesai. Aktor swasta umumnya hanya dilibatkan berdasarkan hubungan kontraktual atau kepemilikan aset, sementara masyarakat masih ditempatkan sebagai pengguna ruang publik, bukan sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan antaraktor masih bersifat hierarkis dan belum mencerminkan prinsip *Interactive Governance* yang menekankan kesetaraan, dialog, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor bukan terletak pada kurangnya jumlah aktor yang terlibat, melainkan pada kualitas hubungan yang terbangun di antara mereka. Keberadaan banyak aktor tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang

efektif apabila tidak disertai komunikasi yang terbuka, koordinasi yang terintegrasi, mekanisme negosiasi yang berjalan sejak tahap perencanaan, serta pelibatan masyarakat secara bermakna. Dengan demikian, peta aktor yang terbentuk masih menunjukkan dominasi pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan aktor lain lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana maupun penerima kebijakan. Kondisi ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut kegagalan penerapan prinsip *Interactive Governance* melalui dimensi komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi pada bagian pembahasan berikutnya.

Kegagalan *Interactive Governance* dalam Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensi utama dalam teori *Interactive Governance* yang dikemukakan oleh Jan Kooiman (2003). Dalam perspektif ini, komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran informasi, gagasan, kepentingan, dan pemahaman antaraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan tata kelola. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme untuk membangun kepercayaan (*trust building*), menciptakan kesamaan persepsi, mengurangi konflik kepentingan, serta menghasilkan keputusan

yang dapat diterima oleh seluruh aktor. Oleh karena itu, kualitas komunikasi menentukan sejauh mana tata kelola mampu berjalan secara kolaboratif. Semakin terbuka komunikasi yang dibangun, semakin besar peluang terciptanya proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Sebaliknya, komunikasi yang bersifat tertutup dan satu arah berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Interactive Governance*. Meskipun terdapat interaksi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, sektor swasta, dan masyarakat, komunikasi yang berlangsung masih didominasi oleh pola birokratis yang bersifat vertikal. DPKPP Kabupaten Bogor sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis menjadi aktor yang menginisiasi hampir seluruh proses komunikasi. Informasi mengenai pembangunan ruang terbuka publik disampaikan kepada aktor lain setelah keputusan utama ditetapkan, sehingga komunikasi lebih berfungsi sebagai mekanisme penyampaian kebijakan dibandingkan sebagai ruang diskusi untuk menyusun keputusan secara bersama.

Pola komunikasi tersebut terlihat jelas pada pembangunan Taman Sim pang 4 Ciawi. DPKPP Kabupaten Bogor mengomunikasikan rencana pembangunan kepada Kecamatan Ciawi sebagai pemerintah wilayah. Namun, komunikasi yang dilakukan hanya terbatas pada penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program dan kondisi lapangan. Kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap desain, lokasi pembangunan, maupun aspek teknis lainnya. Dengan demikian, komunikasi yang terbangun masih bersifat instruktif, di mana kecamatan hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyedia informasi wilayah tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Permasalahan komunikasi semakin terlihat ketika DPKPP Kabupaten Bogor tidak melakukan komunikasi dengan PT Jasamarga sebagai pemilik sah lahan tempat Taman Sim pang 4 Ciawi dibangun. Berdasarkan hasil wawancara, pembangunan taman tetap dilaksanakan tanpa adanya koordinasi maupun persetujuan dari pemilik lahan. Akibatnya, setelah pembangunan selesai, PT Jasamarga menutup kawasan menggunakan pagar BRC karena menganggap pembangunan dilakukan pada aset yang berada di bawah kewenangannya.

Penutupan tersebut menyebabkan taman tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun seluruh proses pembangunan fisik telah selesai dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi pada tahap awal tidak hanya memunculkan konflik antarlembaga, tetapi juga menghilangkan fungsi ruang terbuka publik sebagai fasilitas sosial bagi masyarakat.

Kasus Taman Simpang 4 Ciawi memperlihatkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah lebih berorientasi pada hubungan internal birokrasi dibandingkan komunikasi lintas aktor. Dalam perspektif *Interactive Governance*, kondisi tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi aktor strategis yang memiliki sumber daya dan kewenangan terhadap suatu kebijakan. Padahal, PT Jasamarga merupakan aktor yang memiliki otoritas hukum atas lahan sehingga seharusnya menjadi salah satu pihak yang pertama kali dilibatkan dalam proses komunikasi. Ketidakhadiran komunikasi dengan aktor tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan lebih menitikberatkan pada penyelesaian target fisik daripada membangun kesepahaman antaraktor.

Berbeda dengan Taman Simpang 4 Ciawi, komunikasi pada pengelolaan Taman Kantor Kecamatan Megamendung

menunjukkan pola yang relatif lebih baik. Penelitian menemukan bahwa komunikasi antara DPKPP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung telah berlangsung sebelum pembangunan direalisasikan. Bahkan, kebutuhan pembangunan taman telah disampaikan oleh pihak kecamatan sejak tahun 2019 sebelum akhirnya direalisasikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proses komunikasi yang lebih panjang dibandingkan kasus Taman Simpang 4 Ciawi. Selain itu, keberadaan lahan milik pemerintah kecamatan juga mempermudah proses komunikasi karena tidak melibatkan aktor eksternal sebagai pemilik lahan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa komunikasi pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan persepsi antara DPKPP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung mengenai asal-usul pembangunan taman. DPKPP menyatakan pembangunan merupakan tindak lanjut dari usulan kecamatan, sedangkan pihak kecamatan menjelaskan bahwa pembangunan merupakan bagian dari program teknokratik pemerintah daerah. Perbedaan informasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kelembagaan belum terdokumentasi dengan baik sehingga menimbulkan

accountability diffusion atau kaburnya tanggung jawab antarorganisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses evaluasi maupun pertanggungjawaban kebijakan pada masa mendatang.

Sementara itu, komunikasi pada pengelolaan Rest Area Gunung Mas memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Sayaga Wisata, PT Perkebunan Nusantara, pelaku UMKM, serta berbagai instansi lainnya. Banyaknya aktor yang terlibat mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intensif dan terintegrasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih didominasi oleh hubungan formal melalui mekanisme birokrasi dan belum berkembang menjadi forum komunikasi yang memungkinkan seluruh aktor menyampaikan kepentingan serta mencari solusi secara bersama. Akibatnya, berbagai keputusan strategis masih lebih banyak ditentukan oleh aktor pemerintah dibandingkan hasil interaksi seluruh pemangku kepentingan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor yang paling minim memperoleh akses komunikasi. Pada ketiga lokasi penelitian, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam forum konsultasi publik sebelum

pembangunan dilaksanakan. Komunikasi dengan masyarakat baru dilakukan setelah ruang terbuka publik selesai dibangun, bahkan pada beberapa kasus hanya berupa penyampaian imbauan mengenai kebersihan, keamanan, atau larangan merokok. Pola komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan tata kelola.

Jika dianalisis menggunakan teori *Interactive Governance*, maka pola komunikasi yang ditemukan dalam penelitian ini masih berada pada tingkat *government communication*, yaitu komunikasi yang dikendalikan oleh pemerintah sebagai aktor dominan. Komunikasi belum berkembang menjadi *interactive communication* yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara dua arah, pembelajaran bersama (*mutual learning*), serta penyelesaian masalah secara kolektif. Dominasi pemerintah dalam mengendalikan arus komunikasi menyebabkan aktor lain memiliki ruang yang sangat terbatas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan komunikasi merupakan salah satu faktor

utama yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan *Interactive Governance* dalam tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Komunikasi yang berlangsung masih bersifat hierarkis, sektoral, dan administratif sehingga belum mampu membangun hubungan yang setara antaraktor. Dampaknya terlihat pada munculnya konflik kepemilikan lahan, lemahnya sinkronisasi kebijakan, rendahnya pelibatan masyarakat, serta belum terbentuknya mekanisme penyelesaian masalah secara kolaboratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka melalui forum koordinasi lintas aktor, konsultasi publik sejak tahap perencanaan, serta mekanisme pertukaran informasi yang berlangsung secara berkelanjutan agar prinsip *Interactive Governance* dapat diwujudkan dalam pengelolaan ruang terbuka publik.

Kegagalan *Interactive Governance* dalam Dimensi Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan *Interactive Governance* karena berfungsi menyelaraskan peran, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap aktor. Menurut Kooiman (2003), koordinasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian tugas antarlembaga, tetapi juga sebagai proses penyelarasan kepentingan untuk

mencapai tujuan bersama. Dalam tata kelola ruang terbuka publik, koordinasi menjadi penting mengingat proses perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan melibatkan berbagai organisasi yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Tanpa koordinasi yang efektif, potensi tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, maupun ketidaksinambungan kebijakan akan semakin besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah, koordinasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian tugas administratif dan belum berkembang menjadi mekanisme kerja lintas sektor yang terintegrasi. DPKPP Kabupaten Bogor berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan, sedangkan Bapperida berfungsi melakukan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan dan anggaran. Namun, hubungan koordinatif tersebut lebih banyak berlangsung pada tahap administratif sehingga belum mampu mengintegrasikan seluruh aktor yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan ruang terbuka publik.

Kelemahan koordinasi paling nyata ditemukan pada pembangunan Taman

Simpang 4 Ciawi. Penelitian menunjukkan bahwa DPKPP Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Bapperida Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, dan kontraktor pelaksana selama proses pembangunan. Akan tetapi, koordinasi tersebut tidak melibatkan PT Jasamarga sebagai pemilik lahan. Padahal, PT Jasamarga merupakan aktor yang memiliki kewenangan hukum terhadap lokasi pembangunan taman. Tidak adanya koordinasi sejak tahap perencanaan menyebabkan status lahan tidak terverifikasi secara menyeluruh sehingga konflik baru diketahui setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Akibatnya, PT Jasamarga menutup kawasan taman menggunakan pagar BRC dan ruang terbuka publik yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berorientasi pada hubungan internal birokrasi dan belum mampu menjangkau aktor eksternal yang memiliki pengaruh strategis terhadap keberhasilan program. Dalam perspektif *Interactive Governance*, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi horizontal (*horizontal coordination*), yaitu koordinasi yang seharusnya dibangun dengan aktor di luar struktur pemerintahan. Akibatnya,

pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi gagal menjamin keberlanjutan fungsi ruang terbuka publik karena tidak mampu mengantisipasi persoalan legalitas lahan sejak tahap awal.

Pada pengelolaan Taman Kantor Kecamatan Megamendung, koordinasi menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan Taman Simpang 4 Ciawi. Hal ini didukung oleh status lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Megamendung sehingga tidak menimbulkan konflik kepemilikan. DPKPP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan, pembangunan taman, serta pengelolaan setelah pembangunan selesai. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa proses serah terima pengelolaan taman tidak didukung oleh dokumen resmi maupun standar operasional prosedur yang mengatur pembagian tugas antarinstansi. Pengelolaan selanjutnya dilakukan berdasarkan kesepahaman informal dan inisiatif pemerintah kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun masih bersifat personal dan belum terinstitusionalisasi dalam mekanisme kelembagaan yang jelas.

Koordinasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor juga menunjukkan pola yang serupa.

Keterlibatan dinas tersebut hanya terbatas pada pemberian bantuan tempat sampah sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan taman. Setelah bantuan diberikan, tidak terdapat mekanisme koordinasi lanjutan mengenai pemeliharaan maupun pengembangan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari sistem tata kelola yang berkelanjutan.

Pada Rest Area Gunung Mas, tantangan koordinasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Perkebunan Nusantara, PT Sayaga Wisata, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, serta berbagai instansi lainnya. Banyaknya aktor yang terlibat seharusnya mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi yang lebih intensif agar seluruh kepentingan dapat diintegrasikan dalam pengelolaan kawasan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi masih didominasi oleh hubungan formal berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Pembagian tugas memang telah ditetapkan, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme koordinasi yang mampu menyelesaikan persoalan secara kolektif. Akibatnya, pengelolaan kawasan masih menghadapi berbagai tantangan

dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *Interactive Governance*, koordinasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih berada pada pola **sectoral coordination**, yaitu koordinasi yang berlangsung berdasarkan batas kewenangan masing-masing organisasi. Model ini belum berkembang menjadi **integrated governance** yang menempatkan seluruh aktor sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama. Dominasi pemerintah daerah dalam mengendalikan proses koordinasi menyebabkan aktor lain lebih banyak menjalankan fungsi sesuai tugas administratifnya tanpa terlibat dalam proses penyelesaian masalah secara bersama.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi menjadi salah satu faktor utama penyebab kegagalan *Interactive Governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Koordinasi yang belum terintegrasi menyebabkan munculnya konflik kepemilikan lahan, lemahnya pembagian kewenangan pascapembangunan, serta belum optimalnya sinergi antarperangkat daerah dan aktor nonpemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas

sektor melalui forum koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan, sehingga tata kelola ruang terbuka publik dapat berjalan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kegagalan *Interactive Governance* dalam Dimensi Negosiasi

Dalam perspektif *Interactive Governance*, negosiasi merupakan proses penyelarasan kepentingan antaraktor untuk mencapai kesepakatan dalam penyelenggaraan tata kelola. Kooiman (2003) menjelaskan bahwa keberagaman aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan akan selalu diikuti oleh perbedaan kepentingan, kewenangan, maupun sumber daya. Oleh karena itu, negosiasi menjadi mekanisme penting untuk mencegah konflik, membangun komitmen bersama, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Keberhasilan negosiasi ditentukan oleh keterlibatan seluruh aktor sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya ketika permasalahan telah muncul.

Berdasarkan hasil penelitian, proses negosiasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum mencerminkan prinsip *Interactive Governance*. Negosiasi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah muncul

permasalahan dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negosiasi belum diposisikan sebagai instrumen untuk mengantisipasi potensi konflik, melainkan hanya sebagai upaya penyelesaian ketika konflik telah terjadi. Akibatnya, berbagai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak tahap perencanaan justru berkembang menjadi hambatan dalam pengelolaan ruang terbuka publik.

Kondisi tersebut terlihat paling jelas pada pembangunan Taman Simpang 4 Ciawi. Penelitian menunjukkan bahwa sebelum pembangunan dilaksanakan tidak pernah dilakukan negosiasi antara DPKPP Kabupaten Bogor dengan PT Jasamarga sebagai pemilik sah lahan. Pemerintah daerah tetap melaksanakan pembangunan tanpa adanya kesepakatan mengenai penggunaan lahan. Akibatnya, setelah taman selesai dibangun, PT Jasamarga menutup kawasan menggunakan pagar BRC karena menganggap pembangunan dilakukan pada aset yang masih berada di bawah kewenangannya. Barulah setelah konflik tersebut muncul, pemerintah melakukan upaya koordinasi dan negosiasi dengan PT Jasamarga. Namun hingga penelitian ini dilakukan, negosiasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang mampu mengembalikan fungsi taman sebagai ruang terbuka publik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses negosiasi lebih berfungsi sebagai penyelesaian konflik pascakebijakan daripada sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan. Dalam perspektif *Interactive Governance*, pola seperti ini menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintah dalam membangun konsensus sebelum keputusan diimplementasikan. Seandainya negosiasi dilakukan sejak tahap identifikasi lokasi pembangunan, pemerintah daerah dan PT Jasamarga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan status lahan, alternatif lokasi, maupun mekanisme pemanfaatan aset sehingga konflik yang menyebabkan penutupan taman dapat dihindari.

Berbeda dengan Taman Simping 4 Ciawi, pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung proses negosiasi tidak menghadapi konflik yang signifikan karena pembangunan dilakukan di atas lahan milik pemerintah kecamatan. Ketersediaan lahan tersebut menghilangkan kebutuhan negosiasi dengan pihak eksternal terkait legalitas aset. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa negosiasi dalam aspek pengelolaan pascapembangunan juga belum berjalan secara optimal. Pengalihan tanggung jawab pengelolaan dari DPKPP Kabupaten Bogor kepada Kecamatan Megamendung dilakukan tanpa adanya kesepakatan formal mengenai hak,

kewajiban, maupun standar pengelolaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan lebih bergantung pada hubungan informal antarorganisasi dibandingkan hasil negosiasi yang terdokumentasi secara kelembagaan.

Pada Rest Area Gunung Mas, negosiasi memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Perkebunan Nusantara sebagai pemilik lahan, PT Sayaga Wisata sebagai pengelola, serta pelaku UMKM yang direlokasi ke kawasan rest area. Banyaknya aktor dengan kepentingan yang berbeda menuntut proses negosiasi yang lebih intensif agar setiap pihak memperoleh kepastian mengenai peran dan tanggung jawabnya. Meskipun pemerintah telah melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaan kawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi masih didominasi oleh aktor pemerintah sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat hampir tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan pembangunan ruang terbuka publik. Pada ketiga lokasi penelitian, masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai desain, fungsi, maupun mekanisme pengelolaan ruang

terbuka publik. Aspirasi masyarakat baru muncul setelah kebijakan diimplementasikan, bahkan dalam beberapa kasus disampaikan melalui kritik publik atau media massa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum diposisikan sebagai mitra yang memiliki hak untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, melainkan hanya sebagai penerima hasil kebijakan pemerintah.

Apabila dianalisis menggunakan teori *Interactive Governance*, pola negosiasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menerapkan pendekatan *state-centered governance*, yaitu pemerintah menjadi aktor yang menentukan arah kebijakan secara dominan, sedangkan aktor lain hanya dilibatkan ketika diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Model tersebut berbeda dengan konsep negosiasi dalam *Interactive Governance* yang menempatkan seluruh aktor sebagai pihak yang memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan kepentingan, membangun kompromi, dan menghasilkan keputusan bersama melalui proses dialog yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan negosiasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak

Bogor. Negosiasi yang dilakukan masih bersifat reaktif, tidak terdokumentasi secara kelembagaan, serta belum melibatkan seluruh aktor sejak tahap perencanaan. Akibatnya, konflik kepemilikan lahan, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, serta lemahnya keberlanjutan pengelolaan masih menjadi permasalahan yang ditemukan pada ketiga lokasi penelitian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bogor perlu membangun mekanisme negosiasi yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh aktor strategis sejak tahap awal perencanaan sehingga potensi konflik dapat diantisipasi sebelum kebijakan diimplementasikan.

Kegagalan *Interactive Governance* dalam Dimensi Kolaborasi

Kolaborasi merupakan inti dari konsep *Interactive Governance* karena menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai aktor yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan tata kelola. Menurut Kooiman (2003), kolaborasi tidak hanya ditunjukkan oleh keterlibatan banyak aktor, tetapi juga oleh adanya pembagian peran, tanggung jawab, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi tidak diukur dari banyaknya organisasi yang terlibat, melainkan dari sejauh mana

hubungan antaraktor mampu menghasilkan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor memang telah melibatkan berbagai aktor dari unsur pemerintah, swasta, badan usaha milik negara maupun daerah, serta masyarakat. Namun demikian, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam konsep *Interactive Governance*. Sebagian besar hubungan yang terbentuk masih didasarkan pada pembagian tugas administratif maupun hubungan kontraktual, sehingga setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing tanpa adanya mekanisme kerja bersama yang bersifat setara. Kondisi tersebut menyebabkan kolaborasi lebih bersifat formal daripada substantif.

Pada Taman Simpang 4 Ciawi, hubungan antara DPKPP Kabupaten Bogor dengan kontraktor pelaksana hanya dibangun melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pembangunan fisik taman. Kontraktor bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan melakukan pemeliharaan selama masa kontrak. Setelah masa pemeliharaan berakhir, hubungan kerja juga berakhir tanpa adanya keterlibatan

lebih lanjut dalam pengelolaan kawasan. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan sektor swasta lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual dibandingkan kolaborasi. Masing-masing pihak menjalankan tugas sesuai isi kontrak tanpa adanya ruang untuk bersama-sama merumuskan solusi terhadap persoalan yang muncul selama proses pembangunan.

Kegagalan kolaborasi juga terlihat dari tidak dilibatkannya PT Jasamarga sebagai pemilik lahan dalam proses pembangunan Taman Simpang 4 Ciawi. Padahal, dalam perspektif *Interactive Governance*, pemilik sumber daya strategis merupakan aktor yang seharusnya menjadi bagian dari proses kolaborasi sejak tahap awal. Tidak adanya hubungan kolaboratif dengan PT Jasamarga menyebabkan pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun kesepahaman mengenai pemanfaatan lahan. Akibatnya, setelah pembangunan selesai, konflik kepemilikan lahan tidak dapat dihindari dan berujung pada penutupan taman. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan kolaborasi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya hubungan antarorganisasi, tetapi juga oleh kegagalan pemerintah mengidentifikasi aktor strategis yang seharusnya menjadi mitra dalam penyelenggaraan tata kelola.

Pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung, kolaborasi menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Hubungan antara DPKPP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung berlangsung sejak tahap perencanaan hingga pascapembangunan. Pemerintah kecamatan menyediakan lahan, sedangkan DPKPP bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik taman. Setelah pembangunan selesai, Kecamatan Megamendung melanjutkan pengelolaan melalui kegiatan pemeliharaan rutin, pengawasan kebersihan, serta pengendalian kawasan tanpa rokok. Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang lebih jelas dibandingkan kasus Taman Simpang 4 Ciawi. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hubungan tersebut belum didukung oleh mekanisme kelembagaan yang formal karena tidak terdapat dokumen serah terima maupun standar operasional prosedur yang mengatur pembagian tanggung jawab antarinstansi. Akibatnya, keberlangsungan kolaborasi lebih bergantung pada komitmen masing-masing organisasi daripada sistem tata kelola yang telah dilembagakan.

Kolaborasi dengan perangkat daerah lain juga masih terbatas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, misalnya, hanya berperan dalam penyediaan tempat sampah sebagai bentuk dukungan terhadap

pengelolaan taman. Setelah bantuan tersebut diberikan, tidak terdapat kerja sama lanjutan mengenai pengelolaan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, maupun evaluasi bersama terhadap kondisi taman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah masih bersifat sektoral dan belum membentuk jaringan kerja yang berkelanjutan.

Kompleksitas kolaborasi paling terlihat pada Rest Area Gunung Mas. Pengelolaan kawasan ini melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Perkebunan Nusantara sebagai pemilik lahan, PT Sayaga Wisata sebagai pengelola operasional, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, serta berbagai instansi pendukung lainnya. Secara kelembagaan, konfigurasi tersebut telah mencerminkan karakteristik *multi-actor governance*. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antaraktor masih dipengaruhi oleh pembagian kewenangan yang bersifat birokratis sehingga setiap aktor lebih fokus menjalankan tugas institusionalnya masing-masing. PT Sayaga Wisata, misalnya, bertanggung jawab terhadap operasional kawasan berdasarkan mandat yang diberikan pemerintah daerah, sedangkan aktor lain menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing tanpa adanya forum kolaboratif yang dilakukan secara berkala untuk menyusun kebijakan

maupun mengevaluasi pengelolaan kawasan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku UMKM belum memperoleh posisi yang setara dalam proses kolaborasi. Keterlibatan mereka lebih banyak terjadi setelah kebijakan ditetapkan, khususnya sebagai pengguna fasilitas maupun pelaksana aktivitas ekonomi di kawasan ruang terbuka publik. Masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk ikut menentukan arah pengelolaan kawasan ataupun memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi masih didominasi oleh hubungan antarlembaga pemerintah dan badan usaha, sedangkan masyarakat belum diposisikan sebagai mitra strategis dalam tata kelola.

Apabila dianalisis menggunakan teori *Interactive Governance*, kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih berada pada tingkat *administrative collaboration*, yaitu hubungan kerja yang dibangun berdasarkan pembagian tugas formal dan kewenangan kelembagaan. Pola tersebut belum berkembang menjadi *collaborative governance* yang menekankan kesetaraan, saling ketergantungan, pembelajaran bersama, serta pengambilan keputusan

secara kolektif. Dominasi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan menyebabkan aktor lain cenderung menjalankan fungsi sebagai pelaksana, bukan sebagai mitra yang turut menentukan keberhasilan tata kelola.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan kolaborasi merupakan salah satu penyebab belum optimalnya penerapan *Interactive Governance* dalam tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Banyaknya aktor yang terlibat belum mampu menghasilkan sinergi karena hubungan yang terbentuk masih bersifat administratif dan kontraktual. Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membangun mekanisme kolaborasi yang lebih inklusif melalui pembentukan forum lintas pemangku kepentingan, penyusunan kesepakatan kerja sama yang lebih jelas, serta penguatan peran masyarakat dan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan pengelolaan ruang terbuka publik.

Kegagalan *Interactive Governance* dalam Dimensi Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama dalam *Interactive Governance* karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat

dalam setiap tahapan penyelenggaraan tata kelola. Menurut Kooiman (2003), partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan suatu program, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Melalui partisipasi yang aktif, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat, meningkatkan legitimasi kebijakan, serta membangun rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor masih belum berjalan secara optimal. Masyarakat pada umumnya hanya dilibatkan sebagai pengguna ruang terbuka publik setelah pembangunan selesai dilaksanakan, sedangkan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan hampir tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi maupun memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat pasif dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses tata kelola.

Pada Taman Simpang 4 Ciawi, masyarakat tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan. Seluruh keputusan

mengenai lokasi, desain, anggaran, hingga pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh DPKPP Kabupaten Bogor sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ruang terbuka publik. Akibatnya, masyarakat baru mengetahui keberadaan taman setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Bahkan, sebelum taman sempat dimanfaatkan secara optimal, kawasan tersebut telah ditutup oleh PT Jasamarga akibat konflik kepemilikan lahan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, tetapi juga kehilangan akses terhadap ruang terbuka publik yang sebenarnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Keterlibatan masyarakat pada kasus Taman Simpang 4 Ciawi baru muncul setelah konflik terjadi. Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menjadi salah satu aktor masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap penutupan taman melalui media massa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Namun, keterlibatan tersebut bersifat reaktif karena dilakukan setelah keputusan pembangunan diambil dan konflik telah terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menyediakan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat memberikan

masuk sejak tahap awal perencanaan sehingga aspirasi publik baru muncul dalam bentuk kritik terhadap hasil kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung, kondisi partisipasi masyarakat juga menunjukkan pola yang hampir serupa. Masyarakat memanfaatkan taman sebagai ruang bermain anak, tempat berinteraksi, maupun sarana rekreasi, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan maupun pengelolaan taman. Bentuk partisipasi yang ditemukan hanya berupa kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mematuhi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bentuk partisipasi tersebut lebih mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daripada keterlibatan aktif dalam proses tata kelola.

Pada Rest Area Gunung Mas, partisipasi masyarakat terlihat lebih beragam karena melibatkan pelaku UMKM yang menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan rest area. Kehadiran UMKM memberikan kontribusi terhadap fungsi ekonomi ruang terbuka publik sekaligus menjadi salah satu tujuan pembangunan kawasan tersebut. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih banyak

berperan sebagai penerima kebijakan dibandingkan sebagai aktor yang terlibat dalam proses perencanaan maupun penyusunan mekanisme pengelolaan kawasan. Posisi masyarakat masih berada pada tingkat implementasi kebijakan, sedangkan proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh pemerintah dan pengelola kawasan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *Interactive Governance*, pola partisipasi yang ditemukan pada ketiga lokasi penelitian masih berada pada tingkat *tokenism*, yaitu masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, tetapi belum memperoleh ruang yang memadai untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pemerintah masih menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang menerima manfaat dari kebijakan, bukan sebagai mitra yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pengelolaan ruang terbuka publik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung mencerminkan perspektif pemerintah tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan maupun preferensi masyarakat sebagai pengguna utama ruang terbuka publik.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan ruang terbuka publik. Ketika masyarakat tidak dilibatkan sejak tahap

awal, rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap ruang publik menjadi relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas, mengawasi pemanfaatan ruang, maupun mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Dalam jangka panjang, rendahnya partisipasi dapat mengurangi efektivitas tata kelola karena pemerintah harus menanggung sebagian besar tanggung jawab pengelolaan tanpa dukungan yang memadai dari masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum memenuhi prinsip *Interactive Governance*. Masyarakat masih ditempatkan sebagai pengguna dan penerima manfaat kebijakan, sementara keterlibatan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif melalui forum konsultasi publik, musyawarah dengan masyarakat, maupun pelibatan komunitas lokal sejak tahap perencanaan agar tata kelola ruang terbuka publik dapat berjalan secara lebih demokratis, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Interactive Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Jan Kooiman (2003). Meskipun melibatkan berbagai aktor dari unsur pemerintah, sektor swasta, badan usaha, dan masyarakat, hubungan yang terbentuk masih didominasi oleh pendekatan birokratis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, interaksi antaraktor belum mampu menciptakan tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik aktor yang berbeda, namun menghadapi persoalan tata kelola yang relatif serupa, yaitu lemahnya integrasi antarpemangku kepentingan dalam setiap tahapan pengelolaan ruang terbuka publik.

Analisis berdasarkan lima dimensi *Interactive Governance* menunjukkan bahwa komunikasi masih berlangsung secara hierarkis dan belum menjangkau seluruh aktor strategis, terutama pemilik lahan dan masyarakat. Koordinasi antarorganisasi masih bersifat sektoral sehingga belum mampu mengintegrasikan kewenangan dan sumber daya secara optimal. Negosiasi cenderung dilakukan

setelah konflik muncul, bukan sebagai mekanisme pencegahan sejak tahap perencanaan. Kolaborasi yang terbentuk masih didominasi hubungan administratif dan kontraktual, sementara partisipasi masyarakat belum terlembaga dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan banyak aktor belum secara otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif apabila tidak disertai mekanisme interaksi yang setara dan berkelanjutan.

Perbedaan tingkat keberhasilan pada ketiga lokasi penelitian menegaskan bahwa kualitas *Interactive Governance* sangat dipengaruhi oleh kepastian legalitas lahan, kejelasan pembagian peran, serta intensitas interaksi antaraktor. Taman Simpang 4 Ciawi menjadi contoh kegagalan tata kelola akibat tidak dilibatkannya pemilik lahan sejak tahap perencanaan. Taman Kantor Kecamatan Megamendung menunjukkan tata kelola yang relatif lebih baik, namun masih menghadapi kelemahan pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Rest Area Gunung Mas memperlihatkan penerapan *Interactive Governance* yang paling berkembang melalui koordinasi dan kolaborasi multipihak, meskipun masih memerlukan penguatan forum komunikasi dan peningkatan kesetaraan hubungan antaraktor. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola ruang terbuka publik tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang dibangun antaraktor sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat penerapan *Interactive Governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik melalui penguatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas aktor sejak tahap perencanaan. Verifikasi status kepemilikan lahan perlu dijadikan persyaratan utama sebelum pembangunan dilaksanakan untuk menghindari konflik legalitas sebagaimana terjadi pada Taman Simpang 4 Ciawi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan serah terima ruang terbuka publik agar pembagian kewenangan antarlembaga lebih jelas serta menjamin keberlanjutan pengelolaan setelah pembangunan selesai.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga perlu membentuk forum koordinasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemilik lahan, pengelola kawasan, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat sebagai wadah komunikasi, negosiasi, serta evaluasi

pengelolaan ruang terbuka publik. Keberadaan forum tersebut diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif, serta meningkatkan sinergi antaraktor dalam mewujudkan ruang terbuka publik yang berfungsi secara sosial, ekologis, dan ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2018). Partisipasi masyarakat sebagai basis kebijakan penataan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota yang berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(1), 1–8.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Sukabina Press.
- Budiharjo, E., & Sudjarto, D. (2005). *Kota berkelanjutan*. PT Alumni.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Gehl, J. (2012). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
- Harjanti, I. M., & Anggaraini, P. (2020). Green open space functions in Kauman Area, Semarang City, Indonesia. *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 3(1), 1–9.
- Haryanti, D. T. (2008). *Kajian pola pemanfaatan ruang terbuka publik kawasan Bundaran Sim pang Lima Semarang* (Disertasi, Universitas Diponegoro).
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Nazir. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Porajouw, E. F., Poluan, R. J., & Mastutie, F. (2017). Efektivitas ruang terbuka publik di Kota Tomohon. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*, 4(1), 136–148.
- Rachmawati, T., Muta'ali, L., & Santosa, L. W. (2013). Kajian daya dukung bioekologi Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. *Majalah Geografi Indonesia*, 28(2), 180–197.
- Rohmah, E. N. (2022). Pengelolaan ruang publik (Studi kasus pembangunan Alun-Alun Lamongan). *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 46–54.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suratman, F. N., & Darumurti, A. (2020). Collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1(3), 102–121.
- UN-Habitat. (2018). *SDG indicator 11.7.1 training module: Public space*. United Nations Human Settlements Programme.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.

Indonesia. (2023). *Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penugasan kepada PT Sayaga Wisata dalam Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor.*

Indonesia. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044.*

